

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di berbagai Negara termasuk di Indonesia merupakan salah satu penggerak perekonomian rakyat yang tangguh. Hal ini karena kebanyakan para pengusaha mikro kecil dan menengah berangkat dari industri keluarga/rumahan. Dengan demikian, konsumennya pun berasal dari kalangan menengah ke bawah. Selain itu, peranan UMKM terutama sejak krisis moneter tahun 1998 dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja.

UMKM memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), nilai ekspor nasional dan investasi nasional. Secara keseluruhan, pada tahun 2012 sektor UMKM menyumbang sekitar lebih dari 56% PDB dan pertumbuhan ekonomi makin besar serta PPh dan PPh dari UMKM dapat terserap dan menambah optimalisasi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Kementerian Keuangan, 2012).

Perkembangan sektor UMKM yang demikian pesat memperlihatkan bahwa terdapat potensi yang besar jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik yang tentunya akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh. Sementara itu, di sisi yang lain UMKM juga masih dihadapkan pada

masalah yang terletak pada proses administrasi. Masalah utama dalam pengembangan UMKM yaitu mengenai pengelolaan keuangan dalam usahanya tersebut, karena pengelolaan yang baik memerlukan keterampilan akuntansi yang baik pula oleh pelaku bisnis UMKM. Pada dasarnya UMKM memiliki peluang yang sangat besar untuk mendapatkan kredit berupa suntikan modal. Hingga saat ini banyak program pembiayaan bagi UMKM baik yang dijalankan oleh pemerintah maupun oleh perbankan. Salah satu program pemerintah Indonesia terkait pembiayaan UMKM adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pada tahun 2009 di targetkan sekitar Rp. 20 Triliun. Namun pada prakteknya realisasinya jauh dari target yang direncanakan yakni hanya sebesar Rp. 14,8 Triliun. Penyebab rendahnya penyaluran KUR tersebut karena bank yang di tunjuk masih terlalu berhati-hati dalam penyaluran kredit, karena tidak memiliki akses informasi yang memadai terkait kondisi UMKM (Kementrian Koperasi dan UMKM, 2013).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 pasal 5 mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dalam rangka pengembangan UMKM dalam pemberian kredit atau pembiayaan UMKM, yang menjadi salah satu persyaratannya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan yang di sediakan UMKM. Menurut Baas dan Schrooten (2006) Perbankan memiliki beberapa cara dalam menyalurkan kredit kepada pengusaha yaitu dengan menggunakan Soft Information and Hard Information. Soft Information menggunakan teknik Relationship Landing yakni penyaluran kredit atas dasar

kepercayaan dan hubungan yang telah terbina dengan baik antara bank dan pelaku UMKM sehingga informasi dapat diakses lebih mudah oleh bank.

Sedangkan untuk Hard Information diantaranya menggunakan: 1) Financial Statement Landing, yakni dengan menggunakan laporan keuangan yang telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sebagai sumber informasi untuk pemberian kredit, 2) Asset Based Landing yakni dengan menggunakan Informasi terkait asset-aset yang dijadikan jaminan, 3) Credit Scoring, menggunakan data-data keuangan (rasio keuangan)/ yang tersedia dari Pelaku UMKM kemudian dilakukan penelitian kelayakan berdasarkan standar yang dimiliki perbankan untuk menentukan besaran kredit yang akan diberikan.

Penggunaan Soft Information tentu saja terbatas pada beberapa pengusaha yang memiliki hubungan baik dengan bank, sehingga prakteknya Hard Information mutlak digunakan dalam pengajuan kredit sebagaimana dikemukakan oleh (Baas and Schrooten, 2006). Sementara sebagian besar UMKM tidak memiliki laporan kinerja usaha dan keuangan yang baik sebagai syarat untuk memperoleh kredit. Hal ini terjadi karena UMKM tidak dibiasakan untuk melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sebagai gambaran kegiatan usaha dan posisi keuangan perusahaan. Padahal dengan adanya laporan keuangan akan memungkinkan pemilik memperoleh data dan informasi yang tersusun secara sistematis.

Laporan keuangan berguna bagi pemilik untuk dapat memperhitungkan keuntungan yang diperoleh, mengetahui berapa tambahan modal yang dicapai dan juga dapat mengetahui bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban yang

dimiliki sehingga setiap keputusan yang diambil oleh pemilik dalam mengembangkan usahanya akan didasarkan pada kondisi konkret keuangan yang dilaporkan secara lengkap bukan hanya didasarkan pada asumsi semata. Kebanyakan dari UMKM hanya mencatat jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan dijual, dan jumlah piutang dan utang. Pencatatan itu hanya sebatas pengingat saja dan tidak dengan format yang diinginkan oleh pihak perbankan. Meskipun tidak dapat dipungkiri mereka dapat mengetahui jumlah modal akhir mereka setiap tahun yang hampir sama jumlahnya jika kita mencatat dengan system akuntansi (H. Jati, Beatus B., Otniel N., 2004). Akuntansi merupakan indikator kunci kinerja usaha, informasi akuntansi berguna bagi pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan pengelolaan perusahaan. Hal ini memungkinkan para pelaku UMKM dapat mengidentifikasi dan memprediksi area-area permasalahan yang mungkin timbul, kemudian mengambil tindakan koreksi tepat waktu.

Kelangsungan hidup dan kegagalan perusahaan adalah dua sisi yang saling bertolak belakang, ibarat sisi depan dan belakang sekeping uang logam. Asumsi *going concern* digunakan apabila suatu perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Namun, kemungkinan perusahaan mengalami kegagalan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selalu ada, apabila dengan kondisi krisis ekonomi dan keuangan. Asumsi *going concern* adalah salah satu asumsi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas ekonomi. Asumsi ini mengharuskan entitas ekonomi secara operasional dan keuangan memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya

atau *going concern*. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kegagalan usaha dapat diakibatkan oleh faktor keuangan atau faktor non-keuangan dan dapat berujung pada kegagalan usaha dan kepailitan. Keberlangsungan hidup entitas bisnis dipengaruhi oleh kendala internal dan eksternal. Kendala eksternal dapat berupa kendala di luar perusahaan seperti pasar, kondisi moneter, sosial, politik dan lain-lain. Sedangkan kendala internal adalah kendala di dalam perusahaan itu sendiri seperti kondisi keuangan, sumber daya manusia, budaya perusahaan, penguasaan teknologi, pengawasan internal dan lain-lain (Marisi P. Purba : 2009, 21-35).

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai kondisi UMKM di Indonesia hingga tahun 2012 menyebutkan bahwa jumlah pelaku usaha UMKM telah mencapai 56.534.592 unit usaha atau meningkat sekitar 2,41% dibandingkan dengan tahun 2011. Dan jika dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang ada di Indonesia menjadi sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kelompok UMKM berdasarkan Skala Usaha Nasional

No.	Skala Usaha	Jumlah	(Unit)	Perkembangan	
		2011	2012	Jumlah	%
1	Usaha Mikro	54.559.969	55.856.176	1.296.207	2,38
2	Usaha Kecil	602.195	629.418	27.223	4,52
3	Usaha Menengah	44.280	48.997	4.717	10,65
	Total UMKM	55.206.444	56.534.591	1.328.147	2,41
4	Usaha Besar	4.952	4.968	16	0,32

Sumber : Kementrian Koperasi dan UMKM, 2013

Dari tabel 1.1 dapat diketahui, bahwa sebenarnya jumlah pelaku usaha sektor UMKM lebih jauh daripada pelaku sektor usaha besar. Besarnya pelaku usaha ini tentunya masih menyimpan potensi yang jauh lebih besar dari yang telah dikontribusikan oleh sektor UMKM saat ini.

Tabel 1.2
Kelompok UMKM di Kalimantan Barat

No.	Skala Usaha	Jumlah (Unit)		Perkembangan	
		2012	2013	Jumlah	%
1	Usaha Mikro	60.254	63.462	123.716	5,32
2	Usaha Kecil	14.585	24.305	38.890	66,64
3	Usaha Menengah	1.365	1.334	2.699	-2,27
	Total UMKM	76.204	89.101	165.305	16,92

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Berdasarkan table 1.2 provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 terjadi peningkatan. Terutama pada usaha kecil terjadi peningkatan yang sangat signifikan, tetapi pada usaha menengah terjadi penurunan. Walaupun demikian secara keseluruhan UMKM di Kota Pontianak terjadi peningkatan yg signifikan di atas 10 %.

Tabel 1.3
Kelompok UMKM di Kota Pontianak

No.	Skala Usaha	Jumlah (Unit)		Perkembangan	
		2013	2014	Jumlah	%
1	Usaha Mikro	2.169	2.169	4.338	0
2	Usaha Kecil	1.723	1.723	3.446	0
3	Usaha Menengah	515	515	1.030	0
	Total UMKM	4.407	4.407	8.814	0

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 2014

Berdasarkan tabel 1.3 di Kota Pontianak pada tahun 2013 dan 2014 tidak adanya peningkatan di setiap sektor. Posisi UMKM Kota Pontianak mengalami stagnan, tidak adanya peningkatan.

Dari jumlah UMKM yang ada di kota Pontianak pada tahun 2014 sebanyak 4.407 unit usaha, mayoritas 80 hingga 90 persen sudah melakukan pembukuan/pencatatan akuntansi walaupun hanya sekedar mencatat jumlah kas

yang keluar dan masuk, jumlah hutang dan piutang, tetapi sudah dapat dikatakan melakukan pembukuan yang sederhana.

Laporan keuangan berguna bagi pemilik untuk dapat memperhitungkan keuntungan yang diperoleh, mengetahui berapa tambahan modal yang dicapai dan juga dapat mengetahui bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki sehingga setiap keputusan yang diambil oleh pemilik dalam mengembangkan usahanya akan didasarkan pada kondisi konkret keuangan yang dilaporkan secara lengkap bukan hanya didasarkan pada asumsi semata. Kebanyakan dari UMKM hanya mencatat jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan dijual, dan jumlah piutang dan utang. Pencatatan itu hanya sebatas pengingat saja dan tidak dengan format yang diinginkan oleh pihak perbankan. Meskipun tidak dapat dipungkiri mereka dapat mengetahui jumlah modal akhir mereka setiap tahun yang hampir sama jumlahnya jika kita mencatat dengan system akuntansi (H. Jati, Beatus B., Otniel N., 2004). Akuntansi merupakan indikator kunci kinerja usaha, informasi akuntansi berguna bagi pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan pengelolaan perusahaan. Hal ini memungkinkan para pelaku UMKM dapat mengidentifikasi dan memprediksi area-area permasalahan yang mungkin timbul, kemudian mengambil tindakan koreksi tepat waktu.

Para pelaku UMKM tidak hanya dapat menghitung untung atau rugi, tetapi yang terpenting untuk dapat memahami makna untung atau rugi bagi usahanya (Wulan dan Nindita, 2009). Praktek akuntansi, khususnya akuntansi keuangan pada UMKM di Indonesia masih rendah dan memiliki banyak

kelemahan (Wahdini & Suhairi, 2006). Kelemahan itu, antara lain disebabkan rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dari manajer pemilik dan karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM. Sudarini (1992) dalam Wahdini & Suhairi (2006) juga membuktikan bahwa perusahaan kecil di Indonesia cenderung untuk memilih normal perhitungan (tanpa menyusun laporan keuangan) sebagai dasar perhitungan pajak. Karena, biaya yang dikeluarkan untuk menyusun laporan keuangan jauh lebih besar daripada kelebihan pajak yang harus dibayar. Standar akuntansi keuangan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan harus diterapkan secara konsisten. Namun, karena UMKM memiliki berbagai keterbatasan, kewajiban seperti itu diduga dapat menimbulkan biaya yang lebih besar bagi UMKM dibandingkan dengan manfaat yang dapat dihasilkan dari adanya informasi akuntansi tersebut (*cost-effectiveness*). Di samping itu, tersedianya informasi yang lebih akurat melalui informasi akuntansi yang dihasilkan diduga tidak mempengaruhi keputusan atas masalah yang dihadapi manajemen (*relevance*). Studi terhadap penerapan SAK memberikan bukti bahwa Standar Akuntansi yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan overload (memberatkan) bagi UMKM (Wahdini & Suhairi, 2006). Dalam penelitian Wahdini dan Suhairi (2006:3) studi yang sama juga pernah dilakukan di beberapa negara, dan menyimpulkan bahwa Standar Akuntansi yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan overload (memberatkan) bagi UMKM (Williams, Chen, & Tearney, 1989; Knutson & Hendry, 1985; Nair & Rittenberg 1983;

Wishon 1985). Hal ini telah mendorong komite Standar Akuntansi Internasional (The International Accounting Standards Board) untuk menyusun Standar Akuntansi Keuangan yang khusus bagi UMKM.

Saat ini telah diterbitkan SAK baru khusus untuk ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) dalam rangka pengembangan standar akuntansi bagi UMKM. Sekalipun memberatkan, penelitian tentang jenis informasi akuntansi yang disajikan dan digunakan oleh perusahaan kecil di Australia mengungkapkan bahwa informasi akuntansi utama yang banyak disiapkan dan digunakan perusahaan kecil adalah informasi yang diharuskan menurut undang-undang (*statutory*), yaitu Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas (Homes & Nicholls, 1989). Dari hal-hal yang telah dijelaskan tersebut juga riset-riset yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai penerapan akuntansi pada usaha kecil dan menengah. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk menguji hipotesis mengenai tingkat keberlangsungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menerapkan pembukuan/akuntansi di kota Pontianak . Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini akan mengambil topik : **“ANALISIS TINGKAT KEBERLANGSUNGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG MENERAPKAN PEMBUKUAN/AKUNTANSI DI KOTA PONTIANAK”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan antara UMKM yang menerapkan pembukuan/akuntansi sesuai SAK ETAP dan yang belum menerapkan SAK ETAP di kota Pontianak.
2. Bagaimana penilaian keberlangsungan hidup/usaha (*Going Concern*) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan antara UMKM yang menerapkan pembukuan/akuntansi sesuai SAK ETAP dan yang belum menerapkan SAK ETAP di kota Pontianak.
2. untuk mengetahui penilaian keberlangsungan hidup/usaha (*Going Concern*).

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh atau diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pemahaman penulis dalam bidang akuntansi dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh

Ujian Sidang Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas
Ekonomi Universitas Tanjungpura.

➤ Bagi Mahasiswa atau Akademisi

Menambah pembendaharaan kepustakaan Tugas Akhir Skripsi ini akan memperkaya jumlah literatur yang dapat digunakan oleh kalangan akademisi.

➤ Bagi Pelaku UMKM

1. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangsih bagi upaya memperluas kesempatan kerja melalui usaha mikro kecil dan menengah di Kota Pontianak.
2. Penelitian ini dapat memperoleh penjelasan tentang faktor-faktor penunjang dan penghambat tingkat keberlangsungan usaha jika menerapkan dan tidak menerapkan sistem Akuntansi dalam usaha mikro kecil dan menengah.

➤ Bagi Peneliti Lain

Dapat digunakan sebagai sumber informasi, bahan rujukan dan referensi untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan baik yang bersifat lanjutan, melengkapi, ataupun menyempurnakan.